

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian tentang Penafsiran**

Penafsiran atau interpretasi dilakukan oleh hakim dan juga para praktisi hukum. Interpretasi sering kali dilakukan jika terdapat suatu peraturan perundang-undangan yang kurang jelas. Ada beberapa jenis penafsiran hukum, yaitu :

a. Penafsiran gramatikal

Penafsiran menurut kata-kata didalam undang-undang berdasarkan makna kata-kata yang terdapat didalam undang-undang.

b. Penafsiran sah (resmi/autentik)

Penafsiran yang sudah ditentukan oleh undang-undang.

c. Penafsiran historis

Penafsiran yang dilihat dari sejarah, baik itu sejarah hukumnya atau sejarah undang-undangnya.

d. Penafsiran sistematis

Penafsiran dengan meninjau susunan yang berhubungan dengan pasal lainnya yang terdapat di dalam undang-undang yang sama atau undang-undang lainnya.

e. Penafsiran teleologis (sosiologis)

Penafsiran yang dilakukan dengan melihat maksud dan tujuan undang-undang terhadap masyarakat karena terdapat perbedaan antara kenyataan dimasyarakat dan bunyi undang-undang.

f. Penafsiran ekstensif

Penafsiran dilakukan dengan memperluas arti kata-kata yang terdapat didalam undang-undang.

g. Penafsiran restriktif

Penafsiran dilakukan dengan mempersempit arti kata-kata yang terdapat didalam undang-undang.

h. Penafsiran antisipatoris

Penafsiran ini dilakukan apabila *interpreter* harus merujuk kepada RUU (Rancangan Undang-Undang) yang telah disahkan menjadi undang-undang tetapi belum berlaku untuk menjawab permasalahan yang dihadapi.

## **B. Kajian tentang Perkawinan**

### **a. Pengertian dan Tujuan Perkawinan**

Kata ‘kawin’ dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri; menikah; melakukan hubungan kelamin; berkelamin (untuk hewan); perkawinan.<sup>2</sup> Istilah perkawinan secara yuridis terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 yang menyatakan bahwa “*Perkawinan ialah ikatan lahir*

---

<sup>2</sup> **Kamus Besar Bahasa Indonesia** (online), <http://kbbi.web.id/kawin>, 8 Oktober 2017, 20.43 Wita

*batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini merupakan kodifikasi dari Hukum Islam, Hukum Adat dan juga KUH Perdata yang berasal dari Hukum Barat. Perkawinan menurut hukum Islam sendiri sudah dijelaskan didalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”* Selain itu perkawinan menurut KUH Perdata disebutkan dalam pasal 26 *“Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata.”* Sedangkan dalam hukum adat, perkawinan bukan saja merupakan soal yang mengenai orang-orang yang bersangkutan (sebagai suami istri), melainkan juga merupakan kepentingan seluruh keluarga dan bahkan masyarakat adat pun ikut berkepentingan dalam perkawinan itu.<sup>3</sup> Bagi hukum adat perkawinan adalah perbuatan-perbuatan yang tidak hanya bersifat keduniaan, melainkan juga bersifat kebatinan atau keagamaan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Taufiqurrohman Syahuri, **Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia**, Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hlm 64.

<sup>4</sup> Soepomo, **Bab-Bab Tentang Hukum Adat**, Pradnya Pramita, Jakarta, 1989, hlm 55.

Perkawinan dilakukan untuk mencapai tujuan perkawinan yang sudah disebutkan didalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

*“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”*

Soemiyati menjelaskan, bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan dengan laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari’ah.<sup>5</sup>

#### **b. Syarat-Syarat Perkawinan**

Untuk melakukan perkawinan sendiri harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 6-12. Syarat-syarat perkawinan berisi tentang asas persetujuan, ketentuan umur, pihak-pihak yang dilarang berkawin, ketentuan cerai-kawin, jangka waktu tunggu bagi janda.

Selain itu perkawinan juga mempunyai syarat sahnya perkawinan yang diatur didalam pasal 2. Syarat sahnya perkawinan tersebut terbagi menjadi dua yaitu syarat sah materiil dan juga

---

<sup>5</sup> Soemiyati, **Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan**, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm. 73

syarat sah formil. Beberapa pihak berpandangan bahwa kedua syarat sah tersebut menjadi satu paket tapi beberapa pihak tidak menganggap demikian, walaupun sudah memenuhi salah satu syarat sah maka perkawinan dapat dinyatakan sah.

Perkawinan dapat dicegah, dibatalkan, dan diputus. Perbedaan ketiganya yaitu pencegahan perkawinan terjadi sebelum adanya perkawinan, pembatalan perkawinan terjadi setelah adanya perkawinan dengan jangka waktu 6 bulan setelah perkawinan terjadi, sedangkan putusnya perkawinan yaitu terjadi karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan.

Untuk melakukan ketiganya maka harus memenuhi dahulu syarat-syarat pengajuan dari pencegahan, pembatalan atau perceraian yang sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lain yang juga mengatur tentang perkawinan.

### **c. Rukun-Rukun Perkawinan**

Rukun-rukun perkawinan terdapat didalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 14 – pasal 29. Pada Pasal 14 disebutkan 5 rukun perkawinan yang harus ada untuk melaksanakan perkawinan, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul.<sup>6</sup> Calon mempelai, wali nikah, dua orang saksi dan juga ijab kabul harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

---

<sup>6</sup> Kompilasi Hukum Islam

didalam Kompilasi Hukum Islam dan juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

#### **d. Larangan Perkawinan**

Larangan perkawinan terdapat didalam Pasal 8 – Pasal 10 Undang-Undang Perkawinan dan juga Pasal 39 – Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Larangan perkawinan yang terdapat didalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan sedarah baik garis keturunan kebawah, keatas dan menyamping; hubungan semenda; hubungan sepersusuan; berhubungan dengan istri atau kemenakan dari istri; mempunyai hubungan yang dilarang oleh agamanya. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berisi tentang larangan kawin terhadap seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain yang berarti masih dalam perkawinan sah kecuali telah melakukan syarat yang terdapat didalam Pasal 3 ayat (2) dan juga Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur tentang syarat poligami. Pasal 10 berisi tentang larangan terhadap pasangan suami istri yang telah cerai dua kali dan mau menikah lagi kecuali agamanya mengatur lain.

Sedangkan larangan perkawinan didalam Kompilasi Hukum Islam mempunyai beberapa perbedaan dengan larangan perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan. Dimana larangan perkawinan didalam Kompilasi Hukum Islam yang terdapat didalam Pasal 39 yaitu perkawinan dilarang antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang mempunyai hubungan nasab, hubungan semenda, dan hubungan sesusuan.<sup>7</sup> Semua hubungan tersebut berlaku sampai dengan keturunannya sehingga tidak terputus hanya kepada yang mempunyai hubungan saja. Pada pasal 40 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa dilarang menikahi perempuan yang masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain, perempuan yang masih dalam masa iddah dengan laki-laki lain, dan perempuan yang bukan beragama Islam. Pasal 41 – pasal 44 menyatakan bahwa dilarang memadu istrinya dengan kerabat istrinya, dilarang menikah apabila sudah menikahi 4 orang wanita dan juga dilarang menikah dengan wanita yang sudah di talaknya tiga kali kecuali wanita tersebut yang dimaksud sudah menikah dengan laki-laki lain terlebih dahulu dan dilarang menikah dengan wanita bekas istri dili'an.

### **C. Kajian tentang Pembatalan Perkawinan**

#### **a. Pengertian Pembatalan Perkawinan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 22 menyatakan bahwa *“Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk*

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

*melangsungkan perkawinan.*” Hal itulah yang disebut dengan pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan terjadi setelah terjadinya perkawinan yang terdapat jangka waktu yaitu 6 bulan dihitung dari terjadinya perkawinan.

Pembatalan Perkawinan dalam Islam lebih dikenal dengan Nikahul fasid, terdiri dari dua kata yaitu ‘nikah’ dan ‘fasid’ yang artinya perkawinan yang rusak. Ash Shan’ani mengemukakan bahwa nikah fasid tidak ada didalam Al-Quran dan Hadist, dengan demikian sharahnya tidak ada. Ash Shan’ani juga mengatakan bahwa pada dasarnya dalam syari’at Islam hanya ada nikah yang sah dan juga nikah yang batil.<sup>8</sup>

Menurut Al-Jaziri yang dimaksud dengan *nikah fasid* adalah nikah yang tidak memenuhi syarat sahya untuk melaksanakan perkawinan, sedangkan dikenal juga dengan *nikah batil* yaitu perkawinan yang tidak memenuhi rukun nikah yang telah ditetapkan oleh *syara’*, kedua bentuk perkawinan ini hukumnya tidak sah.<sup>9</sup>

Pembatalan perkawinan terbagi dalam tiga macam yaitu batal mutlak, dapat dibatalkan dan batal demi hukum. Batal mutlak adalah pernikahan yang apabila syarat dan rukunnya jelas tidak terpenuhi. Batal demi hukum yaitu pernikahan yang terbatal karena sebab yang bertentang dengan Islam. Batal demi hukum biasanya terjadi pada pasangan yang ternyata adalah saudara

---

<sup>8</sup> Aulia Muthiah, **Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga**, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 76.

<sup>9</sup> Ibid., hlm. 77



sedarah atau biasa dikenal dengan perkawinan *incest*. Dan perkawinan yang dapat dibatalkan yaitu suatu pernikahan yang sebenarnya dilakukan secara sah, akan tetapi setelah terjadinya pernikahan diketahui hal yang menyebabkannya dibatalkan sehingga pernikahan menjadi tidak sah.<sup>10</sup> Secara sederhana ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan. Pertama, pelanggaran prosedural perkawinan. Kedua, pelanggaran terhadap materi perkawinan.<sup>11</sup>

#### **b. Pengajuan Pembatalan Perkawinan**

Pengajuan pembatalan perkawinan hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu : “

- a. Para anggota keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau dari istri;*
- b. Suami atau istri;*
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;*
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.”*

---

<sup>10</sup> Indah Purbasari, op.cit. hlm. 123-124.

<sup>11</sup> Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, **Hukum Perdata Islam di Indonesia**, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2004, hlm. 107

*“Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal suami-istri, suami atau istri.”*

Hal ini dijelaskan dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam halnya tata cara untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian yang juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 20 sampai dengan pasal 36. Hal ini disebutkan dan diatur pada pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .

Batalnya perkawinan diatur dan disebutkan di dalam Kompilasi Hukum Islam. Perbedaannya didalam Kompilasi Hukum Islam terdapat 2 (dua) jenis batalnya perkawinan yaitu perkawinan yang langsung batal jika tidak memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan didalam peraturan perundang-undangan dan juga terdapat perkawinan yang dapat dibatalkan apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan didalam peraturan perundang-undangan.

### **c. Jenis-jenis dan Alasan-alasan Pembatalan Perkawinan**

Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang perkawinan yang langsung batal dikarenakan hal-hal berikut : “

- a. Suami melakukan perkawinan, sedangkan ia telah memiliki 4 (empat) orang istri yang merupakan batas maksimal;*
- b. Seseorang menikah bekas istrinya yang telah dili'annya;*
- c. Seseorang menikah bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba`da al dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahnya;*
- d. perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu :*

- 1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.*
- 2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.*
- 3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.*
- 4. berhubungan sesusuan, yaitu orng tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.*

- e. *istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan istri atau istri-istrinya.”*

Sedangkan pada pasal 71 merupakan perkawinan yang dapat dibatalkan dengan alasan-alasan : “

- a. *seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;*
- b. *perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud;*
- c. *perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain;*
- d. *perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan;*
- e. *perkawinan dilaksanakan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;*
- f. *perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.”*

Batalnya suatu perkawinan yang sudah diputus oleh hakim mempunyai kekuatan hukum yang tetap, mutlak dan berdampak bahwa perkawinan yang dilakukan dianggap tidak pernah ada. Batalnya suatu perkawinan tersebut dimulai semenjak putusan tersebut dibacakan.

#### **D. Kajian tentang Poligami**

Poligami secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu *polus* dan *gamein*. *Polus* berarti banyak dan *gamein* berarti kawin, yang

apabila digabungkan keduanya menjadi kawin banyak. Poligami dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *ta'did al-zawjah* (berbilangnya pasangan).<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan poligami sebagai suatu cara dalam perkawinan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu bersamaan.<sup>13</sup>

Poligami dapat dibagi menjadi dua sistem yakni poligini dan poliandri. Poligini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu cara dalam perkawinan yang membolehkan seorang laki-laki memiliki istri lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan.<sup>14</sup> Adapun poliandri adalah suatu cara dalam perkawinan yang memperbolehkan seorang perempuan mempunyai suami lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan.<sup>15</sup> Namun, didalam Hukum Islam tidak mengenal adanya poliandri. Mengumpulan banyak suami dalam perkawinan yang bersamaan akan berakibat ketidakjelasan nasab. Oleh karena itu, poliandri haram hukumnya. Dan apabila dilakukan maka perkawinan dengan laki-laki kedua ketiga dan seterusnya termasuk dalam kategori perzinahan.<sup>16</sup>

Poligami yang dimaksud didalam peraturan perundang-undangan adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang mana dalam kehidupan rumah tangganya ada lebih dari satu istri. Hukum

---

<sup>12</sup> Boedi Abdullah & Beni Ahmad Saebani, **Perkawinan & Perceraian Keluarga Muslim**, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 30

<sup>13</sup> <https://kbbi.web.id/poligami>, 9 Oktober 2017, 13.58 Wita

<sup>14</sup> <https://kbbi.web.id/poligini>, 9 Oktober 2017, 13.59 Wita

<sup>15</sup> <https://kbbi.web.id/poliandri>, 9 Oktober 2017, 14.01 Wita

<sup>16</sup> Indah Purbasari, op.cit. hlm. 102

Islam menetapkan poligami sebagai perbuatan yang diperbolehkan atau *mubah*, dan juga hanya dibatasi dengan maksimal 4 orang istri. Dengan berpoligami seorang suami dituntut untuk berlaku adil kepada semua istrinya.<sup>17</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut asas monogami relatif dimana asas tersebut berisi ketentuan dimana poligami diperbolehkan tetapi dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Asas monogami relatif tersebut berasal dari Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Asas yang terkandung di dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu asas monogami terbuka, artinya jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak istri bila lebih dari seorang maka cukup seorang istri saja.<sup>18</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan didalam Pasal 55 bahwa beristri lebih dari seorang pada saat bersamaan hanya dibatasi sampai dengan 4 orang dengan syarat bahwa suami harus berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Selain itu suami juga harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama dimana untuk mendapatkan izin tersebut harus dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

---

<sup>17</sup> Aulia Muthiah, op.cit. hlm. 92

<sup>18</sup>Ibid, hlm. 58.

Dasar hukum untuk berpoligami terdapat dalam surah An-Nisa ayat 3 dan ayat 129. Surah An-Nisa ayat 3 menyebutkan bahwa jika kamu khawatir tidak mampu untuk bersikap adil maka menikah dengan satu orang saja dalam waktu bersamaan. Perkawinan pada dasarnya merupakan pembentukan pola kepemimpinan seorang laki-laki kepada istri-istri dan anak-anaknya.<sup>19</sup> Oleh karena itu ayat diatas tersebut mensyaratkan dua hal yakni batasan terhadap jumlah istri yang diboleh dinikahi adalah empat orang istri dan kewajiban berlaku adil.<sup>20</sup>

Al-Quran juga menegaskan dalam Surat An-Nisa ayat 129. Ayat ini memberikan penekanan bahwa sesungguhnya seorang laki-laki tidak akan mampu berbuat adil pada istri-istrinya. Oleh karena itu, merujuk pula pada ayat sebelumnya, meskipun Hukum Islam membolehkan poligami, namun monogami lebih dianjurkan sebab pada dasarnya manusia tidak akan mampu untuk berbuat adil.<sup>21</sup>

#### **E. Kajian tentang Status Anak**

Anak sebagai bagian dari sumber daya manusia yang utama dari suatu generasi bangsa adalah merupakan suatu amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat dan martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan

---

<sup>19</sup> Boedi Abdullah & Beni Ahmad Saebani, op.cit. hlm. 31

<sup>20</sup> Indah Purbasari, op.cit. hlm. 103

<sup>21</sup> Ibid., hlm. 103

bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam UUD-NRI 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.<sup>22</sup>

Dr. Wirjono dalam bukunya Hukum Waris di Indonesia, antara lain menyebutkan bahwa oleh karena mereka (anak-anak) pada hakikatnya merupakan satu-satunya golongan ahli waris, artinya sanak keluarga tidak menjadi ahli waris apabila si peninggal warisan meninggalkan anak-anak.<sup>23</sup>

Terdapat beberapa macam kategori status anak yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan yaitu anak sah, anak luar kawin, anak tiri, dan anak adopsi/angkat. Perbedaan kategori anak tersebut berpengaruh besar pada hal-hal yang berkaitan dengan hukum keluarga seperti waris dan juga wali nikah.

Kedudukan anak di dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau yang lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dibedakan menjadi dua yaitu anak sah dan anak luar kawin. Ketentuan Pasal 250 BW menyebutkan : *“Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan memperoleh suami sebagai bapaknya.”*

Ketentuan pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa anak sah atau anak dalam kawin adalah anak yang lahir atau tumbuh dalam suatu perkawinan dan mendapatkan si suami sebagai bapaknya, dan

---

<sup>22</sup> I Nyoman Sujana, **Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010**, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015., hlm. 145

<sup>23</sup> Soedharyo Soimin, **Hukum Orang dan Keluarga**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 31



pengertian sebaliknya dari rumusan pasal diatas dikategorikan sebagai anak yang tidak sah atau anak luar kawin.<sup>24</sup>

KUHPerdata membagi anak luar kawin menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu anak zina, anak sumbang dan anak luar kawin. Anak zina menurut prinsip hukum perdata barat adalah anak yang dilahirkan atau dihasilkan dari hubungan antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang salah satu atau keduanya sedang terikat perkawinan dengan yang lain, hal ini sebagai konsekuensi dari asas monogami yang dianut oleh BW. Sedangkan anak sumbang adalah anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana hukum melarang perkawinan antara mereka, misalnya karena masih terikat hubungan darah. Sedangkan anak luar kawin lainnya adalah anak yang dibiakkan atau dilahirkan di luar perkawinan orang tuanya namun bisa diakui oleh orang tuanya.<sup>25</sup>

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan anak luar kawin. Berdasarkan penafsiran *a contrario* dengan berpegang pada rumusan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan, dapat dirumuskan bahwa termasuk anak luar kawin yaitu anak yang tidak termasuk dalam tiga kategori anak sah sebagaimana yang sudah diatur di dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan, yaitu :

---

<sup>24</sup> Ibid., hlm. 63

<sup>25</sup> Ibid., hlm. 64

1. Anak sah yang dibenihkan dan dilahirkan dalam perkawinan yang sah.
2. Anak yang dibenihkan sebelum perkawinan dan dilahirkan dalam perkawinan yang sah.
3. Anak yang dibenihkan dalam perkawinan yang sah dan dilahirkan setelah perkawinan putus.<sup>26</sup>

Sedangkan didalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam kriteria anak sah disebutkan sebagai berikut : “

1. *Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.*
2. *Hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.”*

Pemeliharaan terhadap keturunan adalah pemeliharaan dan perlindungan bagi setiap anak dengan status yang jelas, harus diperlakukan sebagai bagian dari masyarakat yang harus tumbuh dan berkembang disekitar orang tuanya, baik sisi jasmaninya maupun rohaninya. Untuk menjamin terpeliharanya keturunan ini dalam Hukum Islam diharamkan melakukan hubungan suami istri diluar ikatan perkawinan.<sup>27</sup>

Dalam kedudukannya sebagai anak sah, tentu akan mempunyai akibat yuridis. Akibat yuridis anak sah ialah bahwa anak ini mempunyai hubungan keperdataan dengan orang tua serta keluarga orang tuanya. Akibat hubungan tersebut maka muncullah kewajiban

---

<sup>26</sup> Ibid., hlm. 175-176

<sup>27</sup> Aulia Muthiah, op.cit., hlm. 192

untuk saling memelihara. Selain itu akibat yuridis status anak juga berkaitan erat dengan waris.